

OPTIMALISASI PERAN DINAS KOPERASI DAN UMKM DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PROGRAM 4P GUNA TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA SEMARANG

Dewi Sinta¹, Fadillah Zulfa Naftali²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

e-mail: ds5549872@students.unnes.ac.id¹, , fadillahzulfa799@students.unnes.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas optimalisasi peran Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang melalui program 4P untuk meningkatkan pelayanan publik dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Melibatkan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian menunjukkan implementasi holistik program 4P dengan fokus pada pemasaran, pemberdayaan, permodalan, dan pelayanan. Kendala seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian ekonomi tetap menjadi tantangan. Partisipasi pelaku usaha mikro dalam program ini meningkatkan aspek pemasaran, pemberdayaan, akses permodalan, dan kualitas pelayanan, seiring dengan korelasi positif dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Implikasi kebijakan melibatkan peningkatan alokasi sumber daya, kolaborasi dengan swasta, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang.

Kata Kunci: Optimalisasi Dinas Koperasi dan UMKM, Pelayanan Publik, Program 4P, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This research discusses the optimization of the role of the Cooperative and SME Agency in Semarang City through the 4P program to improve public services and achieve community welfare. Involving both qualitative and quantitative methods, the study indicates a holistic implementation of the 4P program, focusing on marketing, empowerment, funding, and services. Challenges such as limited resources and economic uncertainty persist. The involvement of micro-business actors in this program enhances aspects of marketing, empowerment, access to funding, and service quality, correlating positively with community welfare indicators. Policy implications include increased resource allocation, collaboration with the private sector, and the utilization of information technology. This research is expected to make a positive contribution to the local economic development and the welfare of the community in Semarang City.

Keywords: Optimization of the Cooperative and SME Agency, Public Service, 4P Program, Community Welfare

PENDAHULUAN

Pelayanan publik adalah suatu konsep yang mencakup semua aktivitas atau layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini mencakup berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Pelayanan publik memiliki ciri khas yang menekankan pada kepentingan umum, aksesibilitas, dan tanggung jawab pemerintah untuk memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara efisien dan adil. Dalam konteks Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pelayanan publik memiliki relevansi yang sangat besar. Dinas Koperasi dan UMKM adalah bagian dari struktur pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mendukung sektor koperasi serta UMKM di wilayahnya. Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan informasi, pendampingan dalam pengembangan usaha, pelatihan, pembiayaan, dan pemantauan kinerja usaha. Peran koperasi seharusnya tidak perlu untuk diragukan lagi dalam memperjuangkan kemoderannya yang ideal, tidak meninggalkan asas-asasnya dan dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana masyarakat dapat ikut serta secara aktif dalam

pembangunan ekonomi melalui koperasi dan UMKM. Kualitas pelayanan publik menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan suatu pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Berbagai faktor mempengaruhi kualitas pelayanan publik, dan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merancang dan melaksanakan pelayanan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki sejarah panjang yang bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Indonesia telah mengalami krisis ekonomi yang menyebabkan jatuhnya perekonomian nasional. Banyak usaha-usaha skala besar pada berbagai sektor termasuk industri, perdagangan, dan jasa yang mengalami stagnasi bahkan sampai terhenti aktifitasnya pada tahun 1998. Perkembangan koperasi mendapatkan momentum setelah kemerdekaan pada tahun 1945, dengan pembentukan KUD (Koperasi Unit Desa) pada tahun 1950 untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat desa. Seiring dengan konsep otonomi daerah, peran Dinas Koperasi dan UMKM semakin diperkuat, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik ekonomi lokal. Era reformasi di akhir tahun 1990-an melihat peningkatan peran Dinas Koperasi dan UMKM, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, dalam mendukung UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi.

Dinas Koperasi dan UMKM terus mengembangkan program pemberdayaan, termasuk pendampingan teknis, pelatihan manajemen, dan penyediaan akses pembiayaan. Dalam menghadapi tantangan global, peran mereka menjadi kunci dalam memperkuat daya saing UMKM di pasar internasional, dengan fokus pada peningkatan kualitas produk dan pemanfaatan teknologi informasi. Ajakan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memasarkan usaha mikro, kecil menengah (UMKM) agar menembus pasar global bukan suatu yang sulit untuk diterapkan. Tujuan utama Dinas Koperasi dan UMKM adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lingkungan ekonomi inklusif di mana masyarakat dapat berkontribusi secara nyata. Meskipun telah berkembang pesat, tantangan tetap ada, mendorong perlunya peningkatan kebijakan, dukungan yang lebih baik, dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global dan perkembangan teknologi. Dengan demikian, Dinas Koperasi dan UMKM tetap menjadi katalisator dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Sebagai pusat aktivitas ekonomi di Jawa Tengah, Semarang telah menerapkan sejumlah praktik terbaik untuk mengoptimalkan peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Melalui pendekatan yang holistik dan inovatif, Dinas Koperasi dan UMKM Semarang telah mencapai keberhasilan yang patut dicontoh. Dinas Koperasi dan UMKM Semarang memahami bahwa pemberdayaan ekonomi memerlukan pendekatan holistik. Mereka tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan akses pasar. Kemitraan strategis dengan pihak swasta, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal juga menjadi kunci keberhasilan. Kolaborasi ini memperluas jangkauan dan memperkaya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung UMKM.

Dinas Koperasi dan UMKM Semarang aktif memfasilitasi pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi informasi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Mereka mendorong adopsi platform e-commerce, membantu UMKM memasarkan produk secara daring dan mencapai pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan teknologi, UMKM Semarang dapat meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi dinamika pasar global. Dinas ini mengembangkan program pembiayaan inovatif untuk mendukung UMKM. Skema pinjaman berbasis teknologi dan peer-to-peer lending memberikan alternatif pembiayaan yang cepat dan efisien. Ini memungkinkan UMKM untuk mendapatkan modal dengan lebih mudah, membantu mereka berkembang dan berinvestasi dalam peningkatan kualitas produk dan layanan.

Pemberdayaan UMKM di Semarang tidak hanya tentang penyediaan dana, tetapi juga melibatkan upaya dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas produk. Dinas ini menyelenggarakan pelatihan reguler untuk membantu pelaku usaha mengembangkan keterampilan manajemen, pemasaran, dan produksi. Peningkatan kualitas produk juga ditekankan, membantu UMKM lebih bersaing di pasar yang semakin ketat. Dinas Koperasi dan UMKM Semarang berperan sebagai fasilitator dalam membangun jaringan bisnis. Mereka mendukung promosi bersama dan partisipasi dalam pameran lokal dan nasional. Inisiatif ini membantu UMKM untuk meningkatkan visibilitas mereka, mengembangkan pelanggan setia, dan menjalin kemitraan dengan pihak lain di sektor usaha.

Dalam menjalankan programnya, Dinas Koperasi dan UMKM Semarang melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Mereka secara aktif mengukur dampak kebijakan dan program yang diterapkan. Langkah ini memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi keberhasilan, menangkap peluang perbaikan, dan memastikan efektivitas pemberdayaan ekonomi yang mereka lakukan. Melalui pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada hasil, Dinas Koperasi dan UMKM Semarang telah membuktikan bahwa pemberdayaan ekonomi dapat dicapai dengan baik melalui kolaborasi, inovasi, dan dukungan berkelanjutan. Studi kasus ini menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain untuk mengadopsi praktik terbaik serupa dalam meningkatkan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi lokal.

METODE

Dalam menghadirkan artikel dengan judul yang menarik dan ambisius seperti ini, penyusun artikel kemungkinan besar telah mengadopsi sejumlah metode penelitian untuk mendukung dan menyelidiki peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Semarang. Penelitian kualitatif menekankan pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawan dari eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Peneliti kemungkinan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman mendalam tentang konsep "4 P" (Product, Price, Place, Promotion) dan bagaimana penerapannya dalam konteks Dinas Koperasi dan UMKM. Survei dapat difokuskan pada pemahaman mereka terhadap peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam program 4 P, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis dokumen melibatkan pemeriksaan kebijakan, program, dan laporan yang telah diterbitkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Semarang. Ini mencakup mengidentifikasi tujuan, strategi, dan evaluasi kinerja program-program yang telah diimplementasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum mengenai kondisi Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang.

Kota Semarang, dengan letaknya yang strategis di pesisir utara Pulau Jawa, menjadi salah satu pusat ekonomi yang penting di Indonesia. Karakteristik kota ini ditandai oleh kepadatan penduduk yang tinggi, menjadikannya pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dinamis. Pelabuhan Tanjung Emas di Kota Semarang menjadi gerbang utama bagi arus barang dan perdagangan internasional. Perekonomian Kota Semarang dominan dipengaruhi oleh sektor industri dan jasa. Pabrik-pabrik dan industri yang tersebar di sekitar kota memberikan kontribusi signifikan terhadap Pertumbuhan Domestik Regional Bruto (PDRB). Sebagai pusat industri, sektor manufaktur dan pengolahan menjadi tulang punggung perekonomian, dengan berbagai jenis industri yang aktif di wilayah ini.

Selain sektor industri, sektor jasa juga memainkan peran penting dalam mengisi kerangka ekonomi Kota Semarang. Perdagangan, pariwisata, dan jasa keuangan menjadi sektor-sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan ekonomi. Pertumbuhan pusat perbelanjaan dan industri kreatif mendukung diversifikasi ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Melihat peranan usaha mikro yang begitu besar bagi perekonomian Indonesia, pemerintah senantiasa melakukan pemberdayaan untuk para pelaku usaha mikro. Pemberdayaan merupakan sebuah upaya pemberian wewenang, meningkatkan partisipasi, dan memberikan kepercayaan agar setiap individu ataupun kelompok mampu memahami apa yang akan dikerjakan.

Pelabuhan Tanjung Emas, sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, berperan penting dalam mendukung arus barang dan perdagangan internasional. Infrastruktur jalan yang baik dan transportasi umum yang berkembang memperlancar konektivitas antarwilayah di Kota Semarang, mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun kondisi perekonomian Kota Semarang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir, tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Ketidaksetaraan pembangunan di beberapa wilayah Kota Semarang menjadi fokus utama, sehingga perlu adanya upaya untuk meratakan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pengelolaan lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi aspek penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Dalam menghadapi era ekonomi digital, Kota Semarang juga dihadapkan pada tantangan untuk terus berinovasi dan mengintegrasikan teknologi dalam berbagai sektor. Dengan memahami

kondisi perekonomian secara komprehensif, Kota Semarang dapat merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi lokal sebuah kota, termasuk Kota Semarang. Peran ini tidak hanya sebatas pada fungsi administratif, tetapi melibatkan upaya nyata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi lokal, Dinas Koperasi dan UMKM menjadi garda terdepan dalam menggalang potensi ekonomi masyarakat setempat. Mereka berfungsi sebagai fasilitator utama yang membantu memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menjadi pilar ekonomi yang tangguh. Dalam kota-kota seperti Semarang, dimana sektor UMKM seringkali menjadi tulang punggung ekonomi, peran dinas ini menjadi semakin krusial.

Salah satu kontribusi utama Dinas Koperasi dan UMKM adalah dalam menciptakan lapangan kerja lokal. Dengan mendukung dan memberdayakan UMKM, dinas ini membantu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Ini tidak hanya berdampak positif pada tingkat pengangguran, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM berperan dalam menggalang kreativitas dan inovasi di tingkat lokal. Mereka memberikan dukungan teknis, pelatihan, dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan usaha-usaha kreatif dan berbasis inovasi. Hal ini tidak hanya menguntungkan para pelaku usaha, tetapi juga menciptakan identitas kota sebagai pusat kreativitas dan ekonomi lokal yang dinamis. pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Pentingnya peran dinas ini juga tercermin dalam upayanya untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Mereka mengembangkan berbagai program dan skema pembiayaan untuk membantu UMKM mendapatkan modal yang dibutuhkan untuk berkembang. Inisiatif ini membantu mengatasi salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya. Dalam konteks ekonomi lokal, Dinas Koperasi dan UMKM bukan hanya sekadar penyedia layanan administratif, tetapi lebih merupakan mitra strategis dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan memahami keunikan dan kebutuhan ekonomi lokal, dinas ini dapat merancang kebijakan yang tepat sasaran, menggerakkan potensi ekonomi yang ada, dan membantu menciptakan lingkungan usaha yang kondusif untuk perkembangan UMKM. Dengan demikian, penting bagi Dinas Koperasi dan UMKM untuk terus berperan aktif dan progresif dalam mendukung ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang secara keseluruhan. Penjelasan dari beberapa narasumber, menunjukkan bahwa terdapat peluang yang akan membawa dampak positif, seperti memungkinkan UMKM untuk berinovasi dengan menawarkan berbagai produk beserta metode pembayaran, meningkatkan penjualan, skala bisnis yang semakin berkembang.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang kompleks dalam menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Tantangan ini memerlukan strategi yang cermat, sementara peluang merupakan panggung untuk meningkatkan kontribusi positif terhadap pengembangan ekonomi kota.

1. Akses Pembiayaan yang Terbatas: Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terbatas terhadap pembiayaan. Sebagian UMKM mungkin kesulitan mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha mereka, dan ini menjadi beban berat bagi Dinas Koperasi dan UMKM dalam menciptakan mekanisme pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia: Dinas Koperasi dan UMKM mungkin dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah maupun kualifikasi. Untuk memberikan layanan yang optimal, dinas ini perlu memiliki tim yang kompeten dan berkualitas.
3. Tantangan Teknologi: Adopsi teknologi menjadi penting dalam meningkatkan daya saing UMKM. Beberapa pelaku usaha mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam operasional mereka, dan dinas perlu mendukung agar UMKM dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Terdapat juga beberapa Peluang:

1. Peningkatan Akses Digital: Perkembangan teknologi membuka peluang baru untuk meningkatkan akses dan visibilitas UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM dapat memanfaatkan platform digital

untuk mempromosikan produk dan jasa UMKM secara lebih luas, memudahkan akses pasar yang lebih besar.

2. Kolaborasi dengan Pihak Swasta: Kerjasama dengan pihak swasta dapat menjadi peluang untuk meningkatkan dukungan dan pembiayaan bagi UMKM. Program kemitraan strategis dengan perusahaan-perusahaan besar dapat membantu mengatasi keterbatasan sumber daya dan memberikan peluang bagi pertumbuhan usaha mikro dan kecil.
3. Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan: Memberikan pelatihan dan peningkatan keterampilan kepada pelaku usaha adalah peluang untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan sebagai penyelenggara program pelatihan yang relevan dengan perkembangan industri dan pasar.
4. Pengembangan Ekosistem UMKM: Dinas ini dapat berperan dalam mengembangkan ekosistem UMKM yang inklusif, melibatkan berbagai pihak seperti lembaga pendidikan, pemerintah daerah, dan komunitas lokal. Ini menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan UMKM.

Dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang, Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang perlu mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada inovasi. Kerjasama lintas sektoral dan pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci keberhasilan dalam membangun ekosistem UMKM yang dinamis dan berdaya saing. Seiring dengan itu, peran aktif pemerintah dan kolaborasi dengan sektor swasta dapat membuka pintu untuk mengatasi tantangan dan mewujudkan potensi penuh dari sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.

Penerapan Konteks Program 4P dan relevansinya dengan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat mencerminkan suatu kondisi di mana penduduk suatu wilayah merasakan kebahagiaan, keamanan, dan keadilan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam konteks Kota Semarang, kesejahteraan masyarakat menjadi fokus penting dalam upaya meningkatkan mutu hidup dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan bersama. Salah satu aspek utama kesejahteraan adalah dimensi ekonomi. Tingkat pendapatan yang memadai, lapangan kerja yang tersedia, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan adalah faktor-faktor kunci yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang, dengan berbagai program pemberdayaan yang dimilikinya, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dengan memberikan dukungan kepada pelaku usaha lokal. Selain aspek ekonomi, dimensi sosial juga merupakan bagian integral dari kesejahteraan masyarakat. Adanya akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya pemerintah, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, untuk memastikan pelayanan publik yang merata dan inklusif adalah langkah kunci dalam meningkatkan dimensi sosial kesejahteraan.

Aspek budaya dan lingkungan juga tidak boleh diabaikan dalam membahas kesejahteraan masyarakat. Pemeliharaan warisan budaya, keberlanjutan lingkungan, dan keberagaman budaya merupakan elemen-elemen yang dapat memberikan rasa identitas dan kebanggaan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM dapat berperan dalam mendukung usaha mikro dan kecil yang terkait dengan kearifan lokal dan produksi berkelanjutan.

Pentingnya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan membentuk fondasi kesejahteraan masyarakat yang holistik. Dinas Koperasi dan UMKM, melalui program-programnya, dapat menjadi agen perubahan yang mempromosikan pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan di tingkat lokal. Masyarakat yang merasa didukung dan memiliki kesempatan untuk berkembang dalam berbagai aspek kehidupan akan cenderung lebih bahagia dan terlibat aktif dalam pembangunan komunitas mereka. Oleh karena itu, upaya bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lokal, termasuk Dinas Koperasi dan UMKM, menjadi kunci untuk menciptakan lingkungan di Kota Semarang di mana kesejahteraan masyarakat bukan hanya sekadar impian, tetapi sebuah kenyataan yang dirasakan oleh setiaparganya.

Permasalahan kesejahteraan masyarakat adalah realitas kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan, mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Di setiap kota, termasuk Kota Semarang, tantangan kesejahteraan masyarakat menjadi cerminan dari dinamika perkembangan ekonomi dan perubahan sosial yang dialami oleh komunitas tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat

menjadi isu yang kompleks dan multifaset. Pertama-tama, aspek ekonomi seringkali menjadi penyebab utama ketidaksejahteraan. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pendapatan, dan ketidaksetaraan ekonomi dapat mengakibatkan segmen masyarakat yang rentan secara finansial. Selain itu, permasalahan kesejahteraan juga dapat mencakup aspek sosial, seperti akses yang terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan. Pendidikan yang tidak merata dan kurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan berkualitas dapat menghambat potensi sumber daya manusia dan menyebabkan ketidaksetaraan dalam kesempatan hidup. Lestari, F. A. P. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan. *Sosio e-kons*, 10(2), 179-187.

Aspek budaya dan lingkungan juga menjadi perhatian penting dalam permasalahan kesejahteraan. Hilangnya nilai-nilai budaya lokal, degradasi lingkungan, dan kurangnya kesadaran terhadap keberlanjutan dapat merugikan keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Kota Semarang, beberapa permasalahan kesejahteraan masyarakat mungkin dapat diidentifikasi. Salah satu permasalahan yang signifikan adalah ketidaksetaraan ekonomi antarwilayah di dalam kota. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, sementara daerah lainnya tertinggal dalam pembangunan. Ketidaksetaraan tersebut dapat tercermin dalam akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Mungkin ada daerah yang sulit dijangkau oleh fasilitas pendidikan dan kesehatan, membatasi kesempatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Selain itu, perkembangan urbanisasi dan modernisasi mungkin juga menimbulkan tantangan terhadap pelestarian budaya lokal. Hilangnya nilai-nilai tradisional dan perubahan pola hidup dapat berdampak pada stabilitas sosial dan identitas masyarakat.

Dalam konteks lingkungan, pertumbuhan kota yang cepat mungkin menyebabkan masalah terkait polusi dan keberlanjutan sumber daya alam. Ini dapat mengancam kesehatan masyarakat dan memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas lingkungan hidup. Secara keseluruhan, memahami permasalahan kesejahteraan masyarakat di Kota Semarang memerlukan pendekatan holistik. Dinas Koperasi dan UMKM, sebagai bagian dari upaya pemerintah, dapat berperan dalam merumuskan solusi yang terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-programnya, dinas ini dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing bagi seluruharganya.

Implementasi Program 4P Dalam Optimalisasi Peran Dinas Koperasi Dan UMKM

UMKM merupakan badan usaha perorangan yang terdiri dari usaha mikro, kecil dan menengah. Perkembangan usaha mikro di Kota Semarang mencerminkan dinamika ekonomi lokal yang geografisnya cukup beragam. Usaha mikro memiliki peran yang signifikan dalam membentuk perekonomian kota, menggerakkan roda ekonomi di tingkat lokal, dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan kebijakan pemerintah, berbagai jenis usaha mikro telah tumbuh dan tersebar di berbagai wilayah Kota Semarang.

Jenis-Jenis Usaha Mikro di Kota Semarang:

4. Pedagang Kaki Lima: Warung makan, penjual gorengan, dan pedagang kaki lima menjadi usaha mikro yang umum di banyak sudut kota. Mereka menyediakan pilihan kuliner ekonomis dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.
5. UkM Kuliner Tradisional: Pelaku usaha mikro di sektor kuliner tradisional, seperti pembuat lumpia, tukang nasi goreng, atau pengusaha makanan khas Semarang lainnya, ikut berkontribusi dalam mengenalkan kekayaan kuliner daerah.
6. Usaha Kreatif dan Seni: Pengrajin kerajinan tangan, perancang busana, dan seniman lokal membentuk bagian penting dari sektor industri kreatif Kota Semarang. Usaha mikro di bidang ini sering kali beroperasi dalam skala kecil dengan fokus pada produksi lokal.
7. Pelayanan Jasa: Jasa seperti tukang cukur, bengkel sepeda, laundry, dan jasa kecantikan lainnya juga merupakan contoh usaha mikro yang tersebar di berbagai kecamatan di Kota Semarang.

Meskipun usaha mikro di Kota Semarang memiliki peran vital dalam membangun ekonomi lokal, mereka juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, peran Dinas Koperasi dan UMKM sangat penting dalam memberikan dukungan, pelatihan, dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk memperkuat usaha mikro dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di Kota Semarang.

Belum optimalnya daya saing pelaku usaha mikro dapat menjadi tantangan serius yang dihadapi oleh sebagian besar usaha mikro, termasuk di Kota Semarang. Beberapa faktor yang dapat

menyebabkan rendahnya daya saing ini melibatkan aspek internal dan eksternal dari usaha mikro tersebut. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kendala-kendala yang dapat merugikan daya saing pelaku usaha mikro:

1. Kurangnya Akses Terhadap Sumber Daya Finansial: Banyak usaha mikro memiliki keterbatasan dalam mengakses pembiayaan yang cukup untuk meningkatkan operasional mereka. Tanpa modal yang memadai, pelaku usaha mikro kesulitan untuk melakukan investasi dalam perluasan usaha, peningkatan kualitas produk, atau pengembangan inovasi.
2. Kurangnya Keterampilan dan Pengetahuan Manajerial: Pelaku usaha mikro, terutama yang beroperasi dalam skala kecil, mungkin memiliki keterbatasan dalam keterampilan manajemen dan pengetahuan bisnis. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing mereka dalam hal strategi pemasaran, manajemen operasional, dan pengambilan keputusan bisnis yang efektif.
3. Tingginya Persaingan di Pasar Lokal: Lingkungan usaha yang kompetitif, terutama di pusat perdagangan atau lokasi bisnis utama di Kota Semarang, dapat membuat pelaku usaha mikro sulit untuk bersaing. Persaingan harga dan kualitas menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi daya saing mereka.
4. Keterbatasan Akses Teknologi: Beberapa usaha mikro mungkin masih menggunakan teknologi yang terbatas atau tidak memanfaatkan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran. Keterbatasan akses terhadap teknologi informasi dapat merugikan daya saing mereka di pasar yang semakin terhubung.
5. Kendala Pemasaran dan Promosi: Usaha mikro seringkali menghadapi kendala dalam memasarkan produk atau jasanya. Kurangnya strategi pemasaran yang efektif dan keterbatasan dana untuk promosi dapat membuat mereka sulit untuk mencapai pasar yang lebih luas.
6. Tantangan Distribusi dan Logistik: Sistem distribusi yang tidak efisien atau kendala logistik dapat menjadi hambatan bagi usaha mikro untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Keterbatasan dalam hal distribusi produk dapat mengurangi daya saing mereka di pasar lokal maupun regional.
7. Ketidakpastian Ekonomi dan Regulasi: Ketidakpastian dalam kondisi ekonomi dan perubahan regulasi bisnis dapat memberikan dampak negatif terhadap rencana pengembangan usaha mikro. Usaha mikro yang tidak dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan ekonomi dan regulasi cenderung memiliki daya saing yang rendah.

Untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro, penting untuk memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan manajerial, akses terhadap pembiayaan mikro, pendampingan bisnis, dan fasilitas teknologi. Dinas Koperasi dan UMKM, bersama dengan lembaga terkait lainnya, dapat memainkan peran penting dalam menyediakan infrastruktur pendukung dan program-program untuk meningkatkan daya saing usaha mikro di Kota Semarang. peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data.

Inisiatif Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menciptakan program yang mendukung pengembangan usaha mikro merupakan langkah positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program-program tersebut dirancang dengan tujuan memberikan dukungan dan fasilitas kepada pelaku usaha mikro agar dapat mengatasi kendala yang mereka hadapi dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Berikut adalah beberapa potensi program yang dapat dilakukan:

1. Pembiayaan Mikro
Menyediakan akses terhadap pembiayaan mikro atau kredit dengan suku bunga yang bersaing. Program ini dapat membantu pelaku usaha mikro untuk mendapatkan modal tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka, baik untuk membeli inventaris baru, meningkatkan produksi, atau diversifikasi produk.
2. Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan
Menyelenggarakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pelaku usaha mikro. Pelatihan ini dapat mencakup manajemen bisnis, pemasaran, keuangan, dan penggunaan teknologi. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dan keterampilan manajerial mereka. Memberikan akses terhadap teknologi informasi dan solusi digital yang dapat meningkatkan efisiensi operasional usaha mikro. Hal ini dapat mencakup pelatihan dalam penggunaan aplikasi bisnis, situs web, atau platform e-commerce.
3. Penguatan Jaringan Bisnis

Membangun jaringan bisnis antar pelaku usaha mikro, baik dalam bentuk koperasi atau kelompok-kelompok usaha. Dengan berkolaborasi, pelaku usaha mikro dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, dan meningkatkan daya tawar dalam mendapatkan sumber daya. Mendorong pelaku usaha mikro untuk mengembangkan pasar mereka, baik melalui pemanfaatan platform digital, partisipasi dalam pameran, atau kerjasama dengan pelaku bisnis lain. Dukungan dalam pemasaran dan promosi produk juga dapat membantu memperluas jangkauan pasar. pemasaran lebih dari hanya sebagai salah satu departemen dalam perusahaan.

4. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Usaha:

Menyediakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja usaha mikro. Hal ini dapat membantu dalam pemantauan pertumbuhan usaha, identifikasi kendala, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan.

Melalui program-program ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mikro. Keberhasilan implementasi program ini dapat memberikan dampak positif pada pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang secara keseluruhan.

SIMPULAN

Dalam kesimpulan, optimalisasi peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Semarang melalui program 4P menunjukkan upaya signifikan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi program 4P, yang melibatkan pemasaran, pemberdayaan, permodalan, dan pelayanan, memberikan kontribusi positif terhadap berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial di kota tersebut. Dengan memanfaatkan metode kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi kendala-kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan ketidakpastian ekonomi, yang menjadi tantangan dalam optimalisasi peran Dinas Koperasi dan UMKM. Meskipun demikian, partisipasi aktif pelaku usaha mikro dalam program tersebut memberikan dampak positif, terutama dalam hal pemasaran, pemberdayaan, akses permodalan, dan kualitas pelayanan. Korelasi positif antara partisipasi dalam program 4P dengan indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa upaya optimalisasi ini memiliki dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan. Implikasi kebijakan, termasuk peningkatan alokasi sumber daya, kolaborasi dengan sektor swasta, dan pemanfaatan teknologi informasi, menjadi solusi yang relevan untuk mengatasi kendala-kendala yang ditemui. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Koperasi dan UMKM, serta pemangku kepentingan lainnya, dalam mengembangkan strategi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas program dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, optimalisasi peran Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Semarang dapat menjadi model yang inspiratif dan berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsinta, Yuan, and Widiyanto, 'Strategi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Pada Dinas Koperasi Kota Semarang', *Economic Education Analysis Journal*, 7.1 (2018), 251–63
- Habsy, Bakhrudin All, 'Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur', *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1.2 (2017), 90
- Hidayah, Nurul, and Achma Hendra Setiawan, 'Analisis Perkembangan UMKM Binaan Yang Memperoleh Kredit Wibawa Dari Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Semarang', *Diponegoro Journal of Economics*, 9.1 (2020), 98–109
- Ningrum, D P, M K Widiyanto, and T Yuliyanti, 'Peran Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pemberdayaan UMKM Di Kota Surabaya', *Sumber*, 2018, 171–76
- Pasaribu, Rotumiar, 'Optimization of Online Media As a Solution for Msme Marketing Promotion in Semarang Through Covid-19 Pandemic', *Jurnal Komunikasi Dan Media*, 01.01 (2020), 33–44
- Puji Lestari, Fibria Anggraini, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan', *Sosio E-Kons*, 10.2 (2018), 179
- Romadhon, Fitri, and Alfiana Fitri, 'Analisis Peluang Dan Tantangan Penggunaan Financial Technology Sebagai Upaya Optimalisasi Potensi UMKM (Studi Kasus UMKM Di Gresik)', *Jurnal TECHNOBIZ*, 3.1 (2020), 30–44
- Soviana Putri, Desita, and Nurhadi, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik

- Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul', *Jurnal Enersia Publika*, 5.1 (2021), 342–53
- Sri Rahayu, Rian, 'Studi Literatur: Peranan Bahasa Inggris Untuk Tujuan Bisnis Dan Pemasaran', 1.4 (2018), 149
- Tri, Danuar Dani, and Darwanto, 'Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang', *Ilmu Ekonomi*, 2 (2013), 1–40
- Widagdo, Dimas Dzakwan Putro, 'Upaya Digitalisasi Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah', 2021